

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN
KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

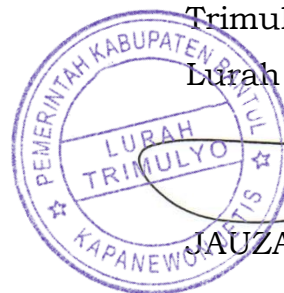
Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah kepada Bupati Bantul melalui Panewu Jetis, di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun di bidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama mulai Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Di samping itu Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Lurah untuk pelaksanaan tugas Lurah yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mungkin dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Trimulyo, begitupun dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Lurah Trimulyo ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Lurah Trimulyo ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang.

Trimulyo, 24 Februari 2025

Lurah Trimulyo,



JAUZAN SANUSI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan Penyusunan Laporan.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Visi dan Misi	5
1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kalurahan	9
BAB II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN	16
BAB III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	19
BAB IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	22
BAB V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25
BAB VI. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	27
BAB VII PELAKSANAAN BUMKAL TRENGGINAS TRIMULYO	28
BAB VIII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN	32
BAB IX. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.....	41
BAB X. PENUTUP	53
LAMPIRAN	
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penyusunan Laporan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau dengan sebutan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang dilalui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kalurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kalurahan, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Kalurahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Kalurahan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Lurah dalam setiap tahunnya

berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Panewu, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir masa Jabatan Lurah yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam jabatan Lurah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
24. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
25. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 7);
32. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 Nomor 3);
33. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 1);

1.3 Visi dan Misi

Kalurahan Trimulyo salah satu Kalurahan di Kapanewon Jetis, dengan kondisi geografis sebagai berikut :

- a. Luas wilayah : 710,4495 Ha
 - tanah sawah : 311,4000 Ha
 - tanah tegalan : 93,3000 Ha
 - tanah pekarangan : 182,9300 Ha
 - tanah SG : 27,2795 Ha
 - tanah lain-lain : 94,2795 Ha
- b. Batas wilayah
 - sebelah utara : Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret
 - sebelah timur : Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret
 - sebelah selatan : Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri
 - sebelah barat : Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
- c. Orbitan (jarak dari pusat Pemerintahan/Kalurahan)
 - jarak dari Kapanewon : 2 Km
 - jarak dari ibukota Kabupaten : 5 Km
 - jarak dari ibukota Provinsi : 10 Km

1.3.1 Visi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Trimulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LKKal, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan

tumbuh di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kalurahan Trimulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi :

“*Mandiri, Tertib, Amanah, Produktif Profesional (MANTAP)* “

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kalurahan Trimulyo berkeinginan mewujudkan kehidupan yang mandiri dengan tata kelola pemerintahan yang tertib dan amanah serta mewujudkan kalurahan yang produktif dan profesional. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mandiri* dalam arti bahwa Pemerintah Kalurahan Trimulyo mampu mencukupi kebutuhan berupa pelayanan umum yang bagus, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang mudah serta meningkatkan kemampuan pemerintah kalurahan dalam membiayai sendiri kegiatan yang ada.
- *Tertib* dalam arti pemerintah kalurahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *Amanah* dalam arti pemerintah kalurahan, lurah dan seluruh perangkat bertanggungjawab atas segala tugas dan fungsi serta mengutamakan pelayanan dengan ikhlas, jujur, dan ramah.
- *Produktif* dalam arti pemerintah kalurahan dan masyarakat Trimulyo memiliki kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga produktivitas menjadi meningkat.
- *Profesional* dalam arti bahwa seluruh perangkat pemerintah kalurahan dapat bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi dan komitmen yang tinggi.

1.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi diwujudkan dalam program, kegiatan, ataupun pelayanan. Misi Pemerintah Kalurahan Trimulyo adalah sebagai berikut :

- a. *mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat kalurahan lain yang lebih maju dengan mengandalkan kekuatan sendiri yang berbasis keunggulan lokal;*

- b. *meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan melalui Bumkal dan optimalisasi pemanfaatan tanah kas kalurahan;*
- c. *meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian kalurahan;*
- d. *meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata;*
- e. *mengupayakan kehidupan masyarakat yang mampu bekerja sama dalam membangun kemandirian dan menciptakan kehidupan yang tenteram;*
- f. *meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap lingkungan, kebersihan, dan kesehatan;*
- g. *meningkatkan kehidupan kemasyarakatan yang penuh dengan kerukunan dan toleransi;*
- h. *meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di kalurahan dan peran sertanya dalam berbagai pembangunan sesuai tugas pokoknya;*
- i. *mewujudkan tersedianya sarana, prasarana operasional pemerintah kalurahan guna menunjang kepuasan pelayanan warga masyarakat;*
- j. *melaksanakan administrasi keuangan yang tertib, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;*
- k. *memutamakan pelayanan kepada warga masyarakat dengan ikhlas, jujur, ramah, dan menyenangkan;*
- l. *pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan kalurahan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;*
- m. *mendorong kreatifitas dan usaha ekonomi produktif industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan;*
- n. *menumbuhkembangkan potensi kalurahan untuk kesejahteraan warga masyarakat; dan*
- o. *mendukung produk unggulan kalurahan dengan menggali, menampung, dan mendorong warga masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera.*

1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Kalurahan

Untuk mendukung tercapainya misi yang dicanangkan, pemerintah kalurahan menyusun program kegiatan sebagai berikut :

1. Misi pertama
 - a. meningkatkan pendampingan UMKM;
 - b. fasilitasi event-event pameran UMKM;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok pembatik; dan
 - d. optimalisasi jejaring untuk pemasaran.
2. Misi kedua
 - a. pendataan aset-aset kalurahan baik yang berupa tanah ataupun barang;
 - b. meningkatkan pemanfaatan aset dan kekayaan milik kalurahan;
 - c. meningkatkan pengelolaan BUMKal; dan
 - d. penambahan aset milik kalurahan.
3. Misi ketiga
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ekonomi;
 - b. optimalisasi forum UMKM; dan
 - c. optimalisasi peran BUMKal.
4. Misi keempat
 - a. peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - b. menciptakan industri-industri rumahan yang memanfaatkan potensi lokal;
 - c. optimalisasi kelompok petani;
 - d. peningkatan ketersediaan pangan dari pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. peningkatan motivasi berwirausaha;
 - f. menciptakan lapangan pekerjaan dengan potensi lokal; dan
 - g. optimaslisasi tempat-tempat wisata.
5. Misi kelima
 - a. peningkatan kemandirian masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif; dan
 - b. menciptakan kehidupan yang tenteram dengan mengoptimalkan linmas.

6. Misi keenam
 - a. peningkatan kapasitas kader kesehatan dan kader lingkungan;
 - b. memotivasi masyarakat untuk menerapkan PHBS;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - d. peningkatan pengelolaan sampah tingkat RT, padukuhan dan kalurahan;
 - e. optimalisasi kelompok PSM (Pemilihan Sampah Mandiri);
 - f. optimalisasi pemberian PMT bagi balita ataupun lansia;
 - g. mendukung terwujudnya kalurahan layak anak dan ataupun padukuhan layak anak; dan
 - h. adanya ruang bermain untuk anak;
7. Misi ketujuh
 - a. peningkatan peran Dukuh, RT, Lembaga tingkat padukuhan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - b. peningkatan peran Satlinmas.
8. Misi kedelapan
 - a. peningkatan kapasitas pengurus maupun anggota Lembaga Kalurahan Trimulyo;
 - b. mendorong keterlibatan aktif Lembaga Kalurahan dalam perencanaan pembangunan kalurahan; dan
 - c. mengikutsertakan Lembaga Kalurahan dalam proses pembangunan kalurahan;
9. Misi kesembilan
 - a. peningkatan kapasitas SDM;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan secara berkala dan berkelanjutan;
 - c. pelatihan yang menunjang kinerja perangkat kalurahan; dan
 - d. meningkatnya etos kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Misi kesepuluh
 - a. peningkatan SDM seluruh perangkat Kalurahan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tata kelola keuangan; dan
 - c. menyampaikan informasi publik sebagai wujud transparansi.
11. Misi kesebelas
 - a. peningkatan kualitas SDM perangkat kalurahan;

- b. pelatihan – pelatihan yang menunjang kinerja;
- c. meningkatkan etos kerja;
- d. meningkatkan kedisiplinan perangkat kalurahan; dan
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan khususnya dalam bidang pelayanan lebih prima.

12. Misi kedua belas

- a. perencanaan kegiatan yang sesuai prioritas rencana pembangunan jangka menengah kalurahan;
- b. pengawasan secara kontinu dan menyeluruh;
- c. menyampaikan informasi publik sebagai wujud transparansi;
- d. tertib menyusun semua dokumen yang diharuskan sesuai aturan; dan
- e. pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan atau program sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

13. Misi ketiga belas

- a. memfasilitasi kelompok usaha berupa forum UMKM;
- b. pembinaan untuk kelompok industri rumahan; dan
- c. memotivasi kelompok UMKM atau pun industri rumahan.

14. Misi keempat belas

Memaksimalkan pertumbuhan potensi kalurahan.

15. Misi kelima belas

- a. menambah produk unggulan kalurahan;
- b. mengenalkan Batik Nitik hingga ke tingkat internasional;
- c. mendorong bertumbuhnya ekonomi kreatif; dan
- d. mendorong daya saing para pelaku ekonomi.

1.4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 6 tahun periode Lurah guna mencapai sasaran dalam RPJMKal. Penyusunan arah kebijakan didasarkan pada visi dan misi lurah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul selama periode pemerintahan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Trimulyo :

- a. Tata Kelola Pemerintahan : perangkat Kalurahan yang professional siap menghadapi perkembangan zaman.

- b. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan : optimalisasi aset dan tanah kalurahan untuk meningkatkan PAKal sebesar 45 %.
- c. Ketahanan Pangan : Penganggaran minimal Rp. 200.000.000 setiap tahun secara tepat dan proporsional.
- d. Pengembangan Ekonomi : kemandirian warga masyarakat yang produktif berbasis produk lokal, berdaya saing di pasaran.
- e. Sosial Budaya : kehidupan masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai kegotongroyongan dan toleransi.
- f. Lingkungan Hidup : lingkungan yang tertata serta masyarakat yang peduli lingkungan, pola hidup bersih dan sehat.
- g. Kesehatan : masyarakat sadar pentingnya Kesehatan, menurunnya kematian ibu dan anak, dan semakin turunnya angka stunting.
- h. Infrastruktur : terpenuhinya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang semua aspek pembangunan.
- i. Sektor pariwisata : pengembangan pariwisata meliputi infrastruktur dan pengelolaan.

1.4.2. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

1.4.2.1.Strategi Internal Pencapaian Program Pembangunan Kalurahan meliputi:

Guna melaksanakan dan mencapai target pembangunan maka Pemerintah Kalurahan Trimulyo menyusun program strategis sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
 - a. Meningkatkan profesional kerja sesuai dengan tupoksi dan pelayanan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas pendataan Kalurahan agar diperoleh data yang valid.
 - c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Kalurahan.
 - d. Meningkatkan pengelolaan informasi Kalurahan dengan menggunakan internet dan website.

- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Kalurahan dengan kegiatan musyawarah dimulai dari tingkat padukuhan.
 - f. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Kalurahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan.
 - b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Meningkatkan kapasitas satlinmas.
 - b. Peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
 - c. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - d. Pengembangan program Kalurahan Layak Anak.
 - e. Peningkatan sarpras mitigasi bencana skala kalurahan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
 - b. Meningkatkan pelatihan, dan penyuluhan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan.
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran untuk kelompok kader pemberdayaan masyarakat Kalurahan, kelompok

usaha ekonomi produktif, PEKKA, dan Penyandang Disabilitas.

1.4.2.2. Strategi Eksternal Pencapaian Program Pembangunan Kalurahan antara lain :

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama di tingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan re-orientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk menyinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan.
3. Mendorong fungsi DPRD di Dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kalurahan melalui haering dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan di mana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian pembangunan Kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan,

program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan. Secara lebih terinci program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal.
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggung jawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangkal.
4. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran.

BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN

Uraian tentang Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.003.866.222,20 (tiga milyar tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah) meliputi 45 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 2.392.145.828,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) meliputi 41 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2024

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- undangan	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan Bersama Lurah	0
		c. Peraturan Lurah	9
		d. Keputusan Lurah	145
2	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	9.698
		2) Perempuan	9.697
		3) Jumlah Kepala Keluarga	6.721
		4) Jumlah Anggota Keluarga	12.674
		5) Jumlah Jiwa	19.395

		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	15.694 18
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian: 1) PNS 2) TNI/POLRI 3) Swasta	386 90 2.103
3	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	- - 30
		b. Luas Tanah : 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Kalurahan	9.823 Ha 85.3192 Ha 86.2475 Ha
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	80.6901 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola : 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan 1) PNS 2) Non PNS	- 34
		b. Jumlah Anggota Bamuskal	9
		c. Musyawarah Kalurahan	7
		d. Musrengbangkal	2
		e. Musyawarah Bamuskal	9
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran	156 2

		3) Jumlah Hansip Terlatih	14
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	6
		2) Jumlah Bencana Alam	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	1
		4) Jumlah Pos Keamanan	44
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	1
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak	ada ada ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan Ya/Tidak	tidak

BAB III
PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Progra Kerja Bidang Pembangunan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.297.127.039,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) meliputi 27 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 2.250.644.039,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) meliputi dengan 26 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2024

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (m)	115 m
		b. Jalan Kabupaten/Kota (m)	Tidak ada
		c. Jalan Provinsi (m)	Tidak ada
		d. Jalan Negara (m)	Tidak ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak ada
		f. Kantor Lurah (Ada/Tidak)	2
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	Tidak ada
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	Tidak ada
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	Tidak ada
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	Tidak ada

		4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b.Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotek (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b.Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c.Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah)	 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

		4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi	6 (RTLH) 5 (MCK) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 410 m

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 adalah sebesar Rp.790.581.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) meliputi 23 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.684.154.585,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi 19 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana tabel berikut ini.

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN**

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan 1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Berapa Kali) 2. Peraruran Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 tentang Kalurahan (Berapa kali) 3. Peraturan Menteri Mengenai Kalurahan (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Peaturan Daerah	 - - - 1

		Provinsi Tentang Kalurahan (Berapa Kali) 2. Sosialisasi Peraturan Gubernur 3. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Kalurahan (Berapa Kali) 4. Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kalurahan (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan 1. Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa Kali) 2. Sosialisasi Peraturan Lurah 3. Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah Kalurahan (Berapa Kali)	2 - 7 7 9 0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan (Ya/Tidak)	1 ya ya ya ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	3 2

		c. Sosialisasi mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	2
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2
		f. Sosialisai mengenai ketenagakerjaan (Berapa Kali)	11
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	138
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	33
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenaga- kerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Progra Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan masyrakat Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 498.696.0000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) meliputi 14 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 462.637.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) meliputi 13 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Bidang Pemberdayaan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini.

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	6
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2
		c. Pemberdayaan olah raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	4
3	Penggalangan Partisipasi	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	2

	Masyarakat	b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	40
--	------------	-----------------------------------	----

BAB VI
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
KALURAHAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Progra Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 250.029.747,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) meliputi 3 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak yaitu untuk Pemberian Bantuan Langsung Tunai.

BAB VII
PELAKSANAAN BUMKAL TRENGGINAS TRIMULYO

1. Kegiatan usaha BUMKAl

Kegiatan Usaha BUMKAl Trengginas Trimulyo sesuai dengan AD dan ART BUMKAl Trengginas Trimulyo ada beberapa kegiatan usaha yaitu:

- a. bidang pengelolaan sampah;
- b. bidang perdagangan:
 - 1) perdagangan eceran makanan lainnya;
 - 2) perdagangan eceran tekstil; dan
- c. bidang pariwisata.

Setelah penyertaan modal dilaksanakan pada akhir tahun 2023, BUMKAl Trengginas Trimulyo telah menetapkan kegiatan usahanya sebagai berikut :

- a. Usaha Perdagangan tekstil dan atau bahan baku batik
- b. Usaha Edukasi dan Wisata
- c. Usaha Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2024, BUMKAl telah melaksanakan beberapa kegiatan usaya sebagai berikut :

- 1) Menjadi supplier bagi kelompok batik yang ada di kalurahan Trimulyo dan sekitar meliputi kain, bahan dan alat untuk membatik. Dengan tujuan mempermudah kelompok batik dalam mendapatkan bahan baku dengan fasilitas transaksi yang terjangkau utamanya untuk kelompok-kelompok rintisan di wilayah Kalurahan Trimulyo.
- 2) Membantu pemasaran Batik Nitik secara online maupun offline dengan menyediakan ruang display di lokasi yang strategis serta penyelenggaraan event-event yang inovatif dan kreatif.

2. Pendapatan BUMKAl

Pendapatan BUMKAl dapat dilihat dari rekapitulasi Laba/Rugi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 yaitu :

No	Bulan	Rugi/Laba
1	Januari	49.000
2	Februari	301.000
3	Maret	362.000
4	April	96.000
5	Mei	108.000

No	Bulan	Rugi/Laba
6	Juni	364.000
7	Juli	268.000
8	Agustus	180.000
9	September	249.500
10	Oktober	255.000
11	November	40.000
12	Desember	125.000
Jumlah		2.397.500

3. Belanja BUMKal

Belanja BUMKal selama tahun 2024 meliputi beberapa hal yaitu :

Belanja barang dagangan : Rp. 59.650.000

Belanja peralatan/inventaris : Rp. 2.106.750

Belanja biaya administrasi : Rp. 365.000 +

Total Belanja : Rp. 62.121.750
4. Saldo Keuangan BUMKal

Saldo Keuangan BUMKal sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BUMKAL " TRENGGINAS" TRIMULYO		
per Tanggal 31 Desember 2024		
AKTIVA		
KAS	Rp	16.673.750
KAS DI BANK	Rp	70.000.000
PIUTANG	Rp-	
PERSEDIAAN	Rp	13.617.000
TANAH	Rp-	
BANGUNAN	Rp-	
INVENTARIS	Rp	2.106.750
TOTAL AKTIVA	Rp	102.397.500
PASIVA		
HUTANG	Rp-	
HUTANG BANK	Rp-	
HUTANG LAINNYA	Rp-	
JUMLAH HUTANG	Rp-	
MODAL	Rp	102.397.500
TOTAL PASIVA	Rp	102.397.500

5. Capaian BUMKal

a. Untuk Kalurahan

BUMKal Trengginas Trimulyo yang sudah terbentuk dan dilakukan penyertaan modal pada akhir tahun 2023 sudah berjalan. Harapannya bisa menambah Pendapatan Asli Kalurahan.

b. Untuk Masyarakat

Dengan adanya beberapa kelompok batik nitik di Kalurahan Trimulyo, menjadikan perputaran roda perekonomian di bidang batik. BUMKal Trengginas Trimulyo mencoba mengarah segmen tersebut. Dengan adanya ketersediaan bahan baku dan alat membatik, sehingga masyarakat pembatik lebih efisien biaya transportasi dan waktu dalam hal pengadaan bahan baku dan alat membatik.

6. Pengawasan BUMKal

a. Hasil pengawasan :

- 1) Pelaporan sudah disampaikan secara rutin, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- 2) Bahwa BUMKal Trengginas sudah mendapatkan sertifikat berbadan hukum sejak bulan Juli 2024.
- 3) Pengelolaan BUMKal sudah sesuai dengan AD dan ART.

b. Rekomendasi :

- 1) Agar dalam menjalankan BUMKal tetap sesuai dengan AD dan ART.
- 2) Untuk memperluas pemasaran unit usaha perdagangan tersebut agar cakupan pasar lebih luas.
- 3) Untuk berinovasi pengembangan usaha yang bertujuan untuk berkembangnya BUMKal dengan sisa modal yang ada, yang baru digunakan 30 %.
- 4) Agar memperhatikan berkaitan Keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 berkaitan dengan panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

c. Apresiasi :

- 1) Pelaksanaan BUMKal sudah tertib, dengan unit usaha yang ada.

- 2) Bulan Februari sudah bisa dimuskalkan, walaupun paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, memuat uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo berpedoman pada Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor 9 Tahun 2023 kemudian dilakukan perubahan satu kali, dengan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2024.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Kalurahan
- b. Belanja Kalurahan, yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
 - 6) Jumlah Belanja; dan
 - 7) Surplus/Defisit
- c. Pembiayaan Kalurahan, yang terdiri dari :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 3) Selisih Pembiayaan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana tercantum dalam rincian berikut ini.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TRIMULYO TAHUN 2024

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 6.389.630.558,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 3.003.866.222,20
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.297.127.039,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 790.581.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 498.696.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 250.029.747,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 6.840.300.758,20
Surplus/Defisit	Rp. (450.670.200,20)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp.
a. Penerimaan Pembayaran	Rp. 450.670.200,20
b. Pengeluaran Pembayaran	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 450.670.200,20

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	
1	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	691.906.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	9.597.665,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	682.308.335,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.525.459.558,00	
4.2.1.	Dana Desa	2.380.850.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	363.478.758,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.531.130.800,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	172.265.000,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	590.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	16.000.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	155.675.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.389.630.558,00	
2	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.003.866.222,20	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	2.392.314.497,20	
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	
1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	691.368.000,00	
1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	691.368.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.263.104,00	
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.263.104,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	299.764.853,20	
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.764.853,20	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000,00	
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.600.000,00	
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1.293.840,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.293.840,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	99.080.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	99.080.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	102.052.200,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	102.052.200,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	57.487.500,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	57.487.500,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	383.906.600,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	383.906.600,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	52.320.000,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	52.320.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	201.398.400,00	
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	201.398.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	186.480.000,00	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	186.480.000,00	
1.2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>132.375.000,00</u>	
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	66.559.000,00	
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	66.559.000,00	
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	58.816.000,00	
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	58.816.000,00	
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>191.465.000,00</u>	
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	152.760.000,00	
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.760.000,00	
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16.290.000,00	
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	
1.3.91		Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	2.890.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
1.3.92		Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	13.425.000,00	
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.425.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	3.600.000,00	
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>194.335.725,00</u>	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.230.000,00	
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.230.000,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	41.960.000,00	
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.960.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.820.000,00	
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	27.665.000,00	
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.665.000,00	
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.520.000,00	
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	31.605.000,00	
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.605.000,00	
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.865.325,00	
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.865.325,00	
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.985.000,00	
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	6.735.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba	7.210.000,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	2.881.400,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.881.400,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuska	525.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	10.440.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.629.000,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.629.000,00	
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>93.376.000,00</u>	
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.160.000,00	
1.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	
1.5.2		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	0	
1.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	
1.5.4		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.5		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.770.000,00	
1.5.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	
1.5.6		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.510.000,00	
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.510.000,00	
1.5.7		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.100.000,00	
1.5.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	11.836.000,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.836.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.297.127.039,00</u>	
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>176.860.000,00</u>	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.510.000,00	
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.510.000,00	
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	141.100.000,00	
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.100.000,00	
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.200.000,00	
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.100.000,00	
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.8	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.950.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>695.913.000,00</u>	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	261.330.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.330.000,00	
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	45.741.000,00	
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.741.000,00	
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.350.000,00	
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.675.000,00	
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.675.000,00	
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	305.850.000,00	
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.850.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	11.152.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.152.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.010.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	29.315.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.315.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	18.240.000,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	4.250.000,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	964.581.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	500.000.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)	268.326.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	268.326.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	196.255.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	86.255.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	395.198.039,00	
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	151.614.789,00	
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.614.789,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	62.200.000,00	
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	167.300.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.300.000,00	
2.4.91		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	8.000.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.92		Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin	6.083.250,00	
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.083.250,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	43.150.000,00	
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	3.150.000,00	
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	21.425.000,00	
2.8.1		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	18.925.000,00	
2.8.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	
2.8.3		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.500.000,00	
2.8.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	790.581.750,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	106.045.000,00	
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	34.885.000,00	
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.885.000,00	
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.900.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	0	
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	25.400.000,00	
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
3.1.5		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.650.000,00	
3.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	14.760.000,00	
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	
3.1.91		Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa/Penginapan	2.200.000,00	
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	10.400.000,00	
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	4.850.000,00	
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	189.064.000,00	
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.580.000,00	
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.580.000,00	
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	20.500.000,00	
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	84.669.000,00	
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.669.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	63.315.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.315.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	317.506.750,00	
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	11.600.000,00	
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	30.135.000,00	
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.135.000,00	
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	69.622.750,00	
3.3.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.997.750,00	
3.3.4	5.3.	Belanja Modal	56.625.000,00	
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	183.774.000,00	
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	183.774.000,00	
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	22.375.000,00	
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.375.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	177.966.000,00	
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.900.000,00	
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	75.165.000,00	
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.165.000,00	
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	52.126.000,00	
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.126.000,00	
3.4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	18.350.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	13.425.000,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	498.696.000,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	53.790.000,00	
4.1.6		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	53.790.000,00	
4.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.790.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	349.084.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.870.000,00	
4.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	11.270.000,00	
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	90.872.000,00	
4.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	90.672.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	228.942.000,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.942.000,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil	5.400.000,00	
		Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen		
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>12.117.000,00</u>	
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.175.000,00	
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	5.005.000,00	
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honoror	2.482.000,00	
		Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader		
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.482.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.455.000,00	
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>11.700.000,00</u>	
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.100.000,00	
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.4.3		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8.600.000,00	
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
4.4.3	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>2.740.000,00</u>	
4.5.3		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	2.740.000,00	
4.5.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
4.6		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>2.405.000,00</u>	
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.405.000,00	
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.405.000,00	
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>66.860.000,00</u>	
4.7.3		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	66.860.000,00	
4.7.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.560.000,00	
4.7.3	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>250.029.747,00</u>	
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>2.185.400,00</u>	
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.185.400,00	
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.185.400,00	
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>6.644.347,00</u>	
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	6.644.347,00	
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.644.347,00	
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>241.200.000,00</u>	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	241.200.000,00	
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	241.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.840.300.758,20	
		SURPLUS / (DEFISIT)	-450.670.200,20	
6.		PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	450.670.200,20	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	450.670.200,20	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	450.670.200,20	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	

2. Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (realisasi APBKal 2024).

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo maka ditetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025.

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	233.932.313,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	5.525.459.558,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	173.695.862,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	5.933.087.733,00
2. Belanja Kalurahan :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp.	2.392.145.828,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.250.644.039,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	684.154.585,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	462.637.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Keadaan Mendesak	Rp.	241.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	6.030.781.452,00
Defisit	Rp.	(97.693.719,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

- Silpa Tahun Lalu	Rp.	450.670.200,20
--------------------	-----	----------------

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
---------------------------	-----	------

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	450.670.200,20
--------------------------	-----	----------------

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran	Rp.	352.976.481,20
----------------------------------	-----	----------------

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 dan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 menjadi lampiran tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 ini.

BAB IX
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI,
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis pada Tahun Anggaran 2024 di setiap bidangnya dapat dilihat sebagai berikut :

**RINCIAN REALISASI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG DICAPAI TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	3.003.866.222,20	2.392.145.828,00	79,64
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	691.368.000,00	691.368.000,00	100,00
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	20.263.104,00	19.197.104,00	94,74
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan	299.764.853,20	232.727.117,00	77,64
5	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	132.300.000,00	132.300.000,00	100,00
6	Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan	30.000.000,00	27.970.000,00	93,23
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.600.000,00	44.000.000,00	92,44
8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	16.062.500,00	53,54
9	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal dan LKK	1.293.840,00	1.292.652,00	99,91
10	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	99.080.000,00	78.483.000,00	79,21
11	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	102.052.200,00	100.927.200,00	98,90
12	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	57.487.500,00	57.487.500,00	100,00
13	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	383.906.600,00	0,00	0,00
14	Tunjangan Masa Kerja	52.320.000,00	52.320.000,00	100,00
15	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	201.398.400,00	201.398.400,00	100,00
16	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer Kalurahan	186.480.000,00	186.480.000,00	100,00

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
17	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	66.559.000,00	65.488.500,00	98,39
18	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	2.074.000,00	29,63
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	58.816.000,00	30.857.000,00	52,46
20	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	152.760.000,00	143.190.000,00	93,74
21	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00
22	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16.290.000,00	16.150.000,00	99,14
23	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	2.890.000,00	2.590.000,00	89,62
24	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Padukuhan	13.425.000,00	0,00	0,00
25	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
26	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.230.000,00	14.114.500,00	86,97
27	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	41.960.000,00	35.207.500,00	83,91
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.820.000,00	19.620.000,00	85,98
29	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	27.665.000,00	24.702.000,00	89,29
30	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.520.000,00	700.000,00	19,89
31	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	31.605.000,00	11.642.700,00	36,84
32	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.865.325,00	2.865.325,00	100,00
33	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.985.000,00	17.785.000,00	93,68
34	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	7.210.000,00	6.850.000,00	95,01
35	Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	2.881.400,00	2.881.400,00	100,00

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
36	Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	525.000,00	350.000,00	66,67
37	Biaya Operasional Padukuhan	10.440.000,00	8.940.000,00	85,63
38	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.629.000,00	6.525.000,00	85,53
39	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.160.000,00	5.610.000,00	55,22
40	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	0,00	0,00	#DIV/0!
41	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
42	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.770.000,00	4.660.000,00	59,97
43	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.510.000,00	52.884.430,00	87,40
44	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	2.100.000,00	0,00	0,00
45	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	11.836.000,00	10.545.000,00	89,09

2. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Dari 45 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, terdapat 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang serapannya optimal, 7 (tujuh) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 4 (empat) kegiatan yang tidak terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal dan tidak terlaksana tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa serapannya hanya 53,54 %, yaitu karena ada anggaran yang diperuntukkan khusus dan tidak ada pencairan untuk kegiatan tersebut.

- Keberhasilan yang dicapai : bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dan adanya apresiasi untuk warga berprestasi.
 - Permasalahan yang dihadapi : belum ada petunjuk khusus terkait penggunaan dana untuk kerawanan sosial.
 - Upaya yang telah ditempuh : konsultasi ke dinas terkait dan tenaga ahli.
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan serapannya hanya 29,63 %, yaitu karena yang diperbaiki hanya kerusakan ringan, sedangkan untuk kerusakan yang berat akan direnovasi.
- Keberhasilan yang dicapai : lingkungan kantor lebih terpelihara dan kerusakan ringan telah dibenahi.
 - Permasalahan yang dihadapi : kerusakan berat tidak terbiayai.
 - Upaya yang telah ditempuh : direncanakan untuk direnovasi.
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) serapannya hanya 52,46 %.
- Keberhasilan yang dicapai : akses jalan difabel sudah terbangun.
 - Permasalahan yang dihadapi : sebagian besar PAKal tidak terealisasi karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun
 - Upaya yang telah ditempuh : dianggarkan kembali di tahun 2025.
- 4) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan serapannya hanya 19,89 %.
- Keberhasilan yang dicapai : sudah melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh.
 - Permasalahan yang dihadapi : aset sebelum 2021 perlu dilakukan penilaian
 - Upaya yang telah ditempuh : sudah melakukan konsultasi ke BPKPAD dan melakukan pelatihan dengan narasumber dari BPKPAD.
- 5) Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) serapannya hanya 36,84 %, yaitu karena ada beberapa Peraturan Kalurahan yang tidak bisa disusun.
- 6) Sertifikasi Tanah Kas Desa serapannya hanya 55,22 %,

- Keberhasilan yang dicapai : sudah terbit 1 rekomendasi tukar guling dari Kabupaten, sudah pemberkasan tanah sejumlah 58 bidang yang difasilitasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
 - Permasalahan yang dihadapi : tukar guling yang belum selesai.
 - Upaya yang telah ditempuh : koordinasi bersama dinas terkait dan juga ahli waris dari pemilik tanah tukar guling.
- 7) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan serapannya hanya 59,57 %, yaitu karena menggunakan sumber dana PAKal, sedangkan sebagian besar PAKal tidak terealisasi karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun.
 - 8) Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh tidak terlaksana, yaitu karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun.
 - 9) Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Padukuhan tidak terlaksana, yaitu karena kegiatan tersebut telah diampu di kegiatan PPKBD.
 - 10) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) tidak terlaksana, yaitu karena kegiatan pensertifikatan tanah dibiayai Kabupaten.
 - 11) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan tidak terlaksana, yaitu karena kegiatan tersebut dibiayai Kabupaten.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Dari 27 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, terdapat 24 (dua puluh empat) kegiatan yang serapannya optimal, 2 (dua) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 1 (satu) kegiatan tidak terlaksana.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	2.297.127.039,00	2.250.644.039,00	97,98
1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.510.000,00	14.510.000,00	100,00
2	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana	141.100.000,00	138.288.000,00	98,01

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PAUD dst)			
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.200.000,00	3.680.000,00	87,62
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.100.000,00	500.000,00	45,45
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.950.000,00	15.950.000,00	100,00
6	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	261.330.000,00	257.520.000,00	98,54
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	45.741.000,00	35.280.000,00	77,13
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.350.000,00	0,00	0,00
9	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.675.000,00	9.375.000,00	96,90
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	305.850.000,00	298.389.000,00	97,56
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	11.152.000,00	10.495.000,00	94,11
12	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.010.000,00	4.300.000,00	71,55
13	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	29.315.000,00	28.895.000,00	98,57
14	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	18.240.000,00	16.260.000,00	89,14
15	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	4.250.000,00	2.750.000,00	64,71
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	268.326.000,00	268.264.000,00	99,98
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	196.255.000,00	196.255.000,00	100,00
19	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	151.614.789,00	151.614.789,00	100,00

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	62.200.000,00	56.125.000,00	90,23
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	167.300.000,00	165.510.000,00	98,93
22	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
23	Bantuan Listrik untuk Masyarakat Miskin	6.083.250,00	6.083.250,00	100,00
24	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	3.150.000,00	1.800.000,00	57,14
25	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
26	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	18.925.000,00	18.300.000,00	96,70
27	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) hanya terlaksana 45,45 %.
 - Keberhasilan yang dicapai : bertambahnya koleksi bacaan di pojok baca.
 - Permasalahan yang dihadapi : belum ada ruangan dan petugas.
 - Upaya yang telah ditempuh : pengadaan pojok baca dan menambah koleksi buku bacaan.
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho, Dll) hanya terlaksana 57,14 % yaitu karena tidak banyak kegiatan dan perayaan hari nasional yang mengharuskan membuat poster, banner, dan lain-lain, serta kurang efisien dalam volume penganggaran. Upaya yang ditempuh adalah akan lebih melihat efisiensi dalam penganggaran.
- 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tidak terlaksana, yaitu karena senam lintas sektor dari Kapanewon tidak dilaksanakan di Trimulyo.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan, terdapat 18 (delapan belas) kegiatan yang serapannya optimal, 1 (satu) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan ada 4 (empat) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	790.581.750,00	684.154.585,00	79,64
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	34.885.000,00	30.131.000,00	86,37
2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	7.900.000,00	0,00	0,00
3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	0,00	0,00	0,00
4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	25.400.000,00	22.878.400,00	90,07
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	5.650.000,00	4.585.285,00	81,16
6	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	14.760.000,00	11.395.000,00	77,20
7	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos /Sewa/Penginapan	2.200.000,00	0,00	0,00
8	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
9	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	4.850.000,00	4.113.800,00	84,82
10	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	20.580.000,00	14.500.000,00	70,46
11	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt.	20.500.000,00	17.465.000,00	85,20
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	84.669.000,00	67.365.000,00	79,56
13	Pembinaan Bidang Keagamaan	63.315.000,00	59.518.000,00	94,00
14	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	11.600.000,00	0,00	0,00

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
15	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	30.135.000,00	24.116.000,00	80,03
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	69.622.750,00	69.370.000,00	99,64
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	183.774.000,00	183.349.000,00	99,77
18	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	22.375.000,00	22.375.000,00	100,00
19	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	18.900.000,00	16.324.500,00	86,37
20	Pembinaan PKK	75.165.000,00	59.280.000,00	78,87
21	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	52.126.000,00	50.690.000,00	97,25
22	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	18.350.000,00	5.108.600,00	27,84
23	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	13.425.000,00	11.190.000,00	83,35

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

- 1) Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan hanya terlaksana 27,84 % karena kegiatan jaga warga di padukuhan belum berjalan semua.
- 2) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah tidak terlaksana karena kegiatan ini menggunakan sumber dana PAKal, sedangkan sebagian besar PAKal tidak terealisasi karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun.
- 3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan tidak terlaksana karena anggaran dialihkan ke kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum.

- 4) Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos /Sewa/Penginapan tidak terlaksana karena kegiatan ini menggunakan sumber dana PAKal, sedangkan sebagian besar PAKal tidak terealisasi karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun.
- 5) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota tidak terlaksana karena tidak ada kegiatan pengiriman kontingen.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dari 14 (empat belas) kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang serapannya optimal, dan 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	498.696.000,00	462.637.000,00	92,77
1	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	53.790.000,00	52.690.000,00	97,96
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.870.000,00	23.170.000,00	97,07
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	90.872.000,00	71.055.000,00	78,19
4	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	228.942.000,00	220.337.000,00	96,24
5	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
6	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	3.175.000,00	2.725.000,00	85,83
7	Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	5.005.000,00	4.820.400,00	96,31
8	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan	2.482.000,00	1.612.100,00	64,95

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Manusia/Kader lainnya			
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1.455.000,00	1.325.000,00	91,07
10	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.100.000,00	0,00	0,00
11	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8.600.000,00	8.122.500,00	94,45
12	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	2.740.000,00	2.415.000,00	88,14
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00
14	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	66.860.000,00	66.560.000,00	99,55

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak tidak terlaksana karena kegiatan ini menggunakan sumber dana PAKal, sedangkan sebagian besar PAKal tidak terealisasi karena perpanjangan izin SSA belum turun sampai akhir tahun.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Dari ketiga kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	250.029.747,00	241.200.000,00	96,47
1	Kegiatan Penanggulanan Bencana	2.185.400,00	0,00	0,00
2	Penanganan Keadaan Darurat	6.644.347,00	0,00	0,00
3	Penanganan Keadaan Mendesak	241.200.000,00	241.200.000,00	100,00

BAB X

PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

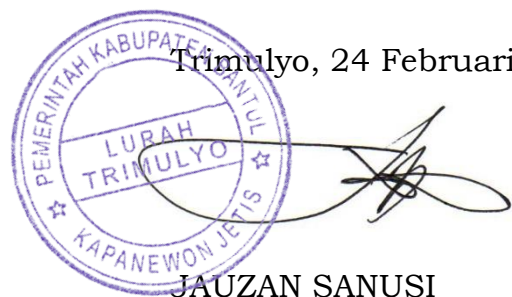
Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, namun saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran yang ada dari APBN berupa Dana Desa, APBD Kabupaten Bantul salah satunya Dana Bagian Kalurahan dari hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, bagi hasil Retribusi dan Pajak dari Kabupaten serta Pendapatan Asli Kalurahan. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada tahun 2024, terutama kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bupati Bantul selaku pemangku kebijakan daerah;
2. Yth. Panewu Jetis selaku pembina;
3. Yth. Bamuskal Trimulyo selaku mitra kerja Pemerintah Kalurahan;
4. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Trimulyo dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Trimulyo.

Demikian laporan ini dibuat, tidak lupa kami mohon saran, kritik dan masukannya yang bersifat membangun agar dapat kami tindak lanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Trimulyo, 24 Februari 2025



JAUZAN SANUSI